

## Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020)

Afif Syarifudin Yahya

Institut Pemerintahan Dalam Negeri; afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id

\* Correspondence: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia

Received: 24-12-2023; Accepted: 28-12-2023; Published: 31-12-2023

**Abstrak:** Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi.

**Kata Kunci:** Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.

**Abstract:** Decentralization policy has given very broad authority to the Local Government. These various authorities are carried out by Local Agency as assistant Head of Local Government. Therefore, Local Agency is the spearhead of the successful implementation of government affairs. Local Agency with a high level of maturity shows high performance results, and vice versa. This study aims to analyze the level of maturity on Local Agency of Population Administration and Civil Registration Affairs. The method used is mixed methods with a sequential explanatory strategy. Data collection is carried out by filling out of table based on 11 variables regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 99 of 2018. The tables that have been filled then verified through interviews and documentation study to obtain supporting evidence for implementation, so that the analysis results become valid. Interviews were conducted with Head of Agency, Secretary of Agency, Heads of Division, Heads of Sections, Heads of Subdivisions, and Technical Implementers. The results of the study show that the maturity level on Local Agency of Population Administration and Civil Registration Affairs is in the "Very Low" category with a score of 18. Based on this, Local Governments should strive to fulfill the requirements for variables with a very low level of maturity, namely service quality assurance, education and training of apparatus, policy analysis and task problem solving, measurable and work equipment resources, risk management in carrying out apparatus tasks, and organizational culture.

**Keywords:** Local Agency Maturity, Minister of Home Affairs Regulation Number 99 of 2018; Population Administration and Civil Registration Affairs; Very Low Performance.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia telah mengalami pergeseran penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan, penyelenggaraan pemerintahan lebih condong ke sentralisasi tetapi setelah reformasi 1998 telah bergeser ke desentralisasi. Hal ini ditunjukkan dari hubungan Pusat dengan Daerah dalam pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dahulu Pusat bertindak sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan sedangkan saat ini Pusat lebih berperan sebagai pembuat kebijakan sedangkan Daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan (Suwandi & Yahya, 2019; Nuradhawati, 2019).

Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah (Suwandi & Yahya, 2017b; Said, 2015). Pasal 18 ayat (5) Konstitusi (amandemen) secara jelas mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam otonomi luas, Daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah, kecuali urusan pemerintahan yang sudah ditetapkan sebagai kewenangan Pusat (Khairi, 2021; Suwandi & Yahya, 2017a). Adapun yang menjadi kewenangan absolut Pusat yakni pertahanan, keamanan, politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Berbagai kewenangan yang diberikan kepada daerah mencakup urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Di sisi lain, Pemerintah daerah juga mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan dan ditugas-pembantuankan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, 2022).

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016). Perangkat daerah memiliki kedudukan penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain sebagai pembantu Kepala daerah dan DPRD, juga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016). Kemudian perangkat daerah juga berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di daerah. Maju atau mundurnya suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah (Khairi, 2021; Yahya & Amzan, 2022).

Untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola yang baik, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 untuk mengukur sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variabel tersebut sangat menentukan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah, apakah pada posisi Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, atau Tingkat V. Penentuan tingkat kematangan didasarkan atas nilai pada masing-masing variabel yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pada masing-masing variabel (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, 2018). Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal.

Kematangan perangkat daerah adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi. Pengukuran kematangan perangkat daerah pertama sekali dikenal dengan istilah *capability maturity model (CMM)* (Gottschalk, 2009). CMM dapat dibedakan ke dalam dua model yaitu model bertingkat (*staged model*) dan model berkesinambungan (*continuous model*). Model bertingkat menekankan pada pengukuran pada kumpulan proses organisasi yang menunjukkan tingkat-tingkatan yang menunjukkan “kematangan” organisasi, sedangkan model berkesinambungan menekankan pendekatan dengan menentukan titik awal dan kemudian

menentukan titik perubahan proses berikutnya. Pendekatan ini lebih menekankan pada “kemampuan” organisasi pada setiap proses organisasi. CMM model bertingkat menyediakan peta jalan bagi organisasi untuk membangun kematangan organisasi dengan menentukan area proses organisasi yang harus dibangun pada setiap tingkatan. CMM bertingkat merupakan pendekatan untuk meningkatkan proses didalam organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya (Khairi et al., 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah masih dalam kategori cukup, bahkan rendah (Azmi, 2022; Sucitra & Supriatna, 2020; Ekowati & Akbar, 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah antara lain partisipasi (Widigdo, 2015), motivasi kerja (Nurrahman & Rahmadanita, 2022), daya tanggap (Kusmana & Prasetyawan, 2021), kapasitas anggaran (Ahmari & Amar, 2014), tata kelola organisasi (Suprianto, 2014), kolaborasi/kerja sama (Azmi, 2022) dan capaian kinerja belum menjadi basis penilaian (Ayudia & Abdullah, 2023). Di sisi lain, besaran perangkat daerah perlu disesuaikan dengan beban kerja yang diemban agar menghasilkan kinerja yang optimal (Khairi, 2022 (Yahya, 2023). Kinerja perangkat daerah yang rendah berdampak terhadap kualitas layanan yang diberikan (Yahya & Setiyono, 2022).

Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan evaluasi, mengingat telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun. Termasuk salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penyelenggara urusan pemerintahan bidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil. Evaluasi terhadap perangkat daerah dimaksudkan untuk mengukur produktivitas serta efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan demikian diharapkan perangkat daerah mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan tuntunan aktual masyarakat dan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Memperhatikan berbagai fenomena dan argumen di atas bahwa tingkat kematangan berperan penting terhadap capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini difokuskan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## 2. Metode

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Metode campuran (*mixed methods*) dengan strategi eksplanatoris sekuensial menekankan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil analisis kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018). Pada tahap awal, ditanyakan beberapa hal sesuai dengan variabel pengukuran untuk menghasilkan data angka. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif untuk memberikan interpretasi atas hasil pengukuran tersebut (Tashakkori & Teddlie, 2010). Studi ini menekankan pada penggambaran kondisi riil atau keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pelaksanaan (Nawawi & Martini, 2005).

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar isian tabel pada 11 variabel penentu tingkat kematangan perangkat daerah, wawancara, dan studi dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data tingkat kematangan perangkat daerah melalui pengisian daftar isian tabel disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mencakup 11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah, sebagai berikut:

**Tabel 1. Variabel dan Penentuan Peringkat Kematangan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah**

No	Variabel	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
1	Perencanaan pembangunan daerah	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan tanpa ada kriteria yang terukur.	Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil (outcome) apa yang akan dicapai kegiatan tersebut.	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome) dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome).	Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain.	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
2	Monitoring dan pengendalian pelaksanaan	Monitoring dan pengendalian dilakukan dengan	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan kriteria	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi

No	Variabel	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
	tugas perangkat daerah	cara sederhana dan tidak terstruktur.	berkala dengan fokus yang ditentukan.	penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan	penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan umpan balik berupa perbaikan yang terdokumentasi dengan baik.	termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet.
3	Penjaminan mutu layanan perangkat daerah	Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.	Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan	Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.	Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
4	Standar operasional prosedur pelayanan perangkat daerah	Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah.	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP).	Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP.	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
5	Pendidikan dan pelatihan aparatur	Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah Yang bersangkutan.	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial untuk jabatan tertentu.	Dokumen rencana kebutuhan pengembangan Pegawai disusun untuk seluruh jabatan.	Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan.	Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik.
6	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan	Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdam	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan

No	Variabel	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
		dengan metode yang tidak terukur.	daerah yang bersangkutan.	menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait	pak ke publik melibatkan tim ahli.	melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
7	Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur	Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku.	Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/ sumber daya yang sudah ditetapkan.	Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah.	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk.	Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
8	Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur	Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah.	Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu.	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi.	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.	Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
9	Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur	Belum ada target/rencana kinerja perangkat daerah yang terukur	Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah.	Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan.	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.	Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta didukung dengan teknologi informasi.
10	Pengembangan inovasi layanan perangkat daerah	Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.	Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).	Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan.	Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.

No	Variabel	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
11	Budaya organisasi perangkat daerah	Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah.	Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan	Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di Perangkat daerah yang bersangkutan.	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi	Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan

Sumber: diolah oleh Penulis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Pertanyaan pada masing-masing variabel tersebut disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan studi sesuai dengan koridor ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

- 2) Wawancara dilakukan untuk memverifikasi jawaban yang telah diisi pada daftar isian yang mencakup 11 (sebelas) variabel penentu tingkat kematangan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penentuan informan dilaksanakan secara *purposive sampling* terhadap pejabat atau pegawai yang memenuhi kriteria tertentu (Kumar, 2008) yang melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yakni: Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis.
- 3) Studi dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen yang menjadi data dukung atas apa yang telah diisi sesuai variabel yang ditanyakan. Kemudian dilakukan penelaahan atas dokumen tersebut. Selain itu juga dilakukan penelaahan berbagai konsep dan teori organisasi, khususnya teori yang berkaitan dengan tingkat kematangan perangkat daerah, maupun dokumen kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data (Arikunto, 2007).

Adapun metode analisis data dilakukan dengan memverifikasi dan memvalidasi data yang telah diisi pada tabel isian 11 variabel. Apa yang telah diisi harus dilengkapi dengan bukti pendukung pelaksanaan. Apabila tidak dilengkapi dengan bukti pendukung pelaksanaan maka apa yang telah diisi pada tabel isian tingkat kematangan organisasi



dinilai tidak valid dan diturunkan atau diberikan nilai paling rendah (1). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah. Penarikan kesimpulan didasarkan atas perolehan skor/nilai masing-masing variabel kemudian diakumulasi dan ditentukan tingkat capaiannya apakah masuk kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi, dengan nilai interval sebagai berikut:

- 1) Skor 10-19 masuk kategori Sangat Rendah;
- 2) Skor 19,1-28 masuk kategori Rendah;
- 3) Skor 28,1-27 masuk kategori Sedang;
- 4) Skor 37,1-46 masuk kategori Tinggi; dan
- 5) Skor 46,1-55 masuk kategori Sangat Tinggi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penentuan tingkat kematangan perangkat daerah didasarkan atas 11 (sebelas) variabel yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil pengisian tabel yang berisikan data/informasi tingkat kematangan organisasi dan dokumen pendukung maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

#### (1) Variabel Perencanaan

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Variabel Perencanaan**

NO	URAIAN KEGIATAN DALAM DPA		TOR		ANALISIS MENCAPAI OUTCOME	METODE PENENTUAN PRIORITAS
			KETERSEDIAAN	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ada	ada	ada	ada	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	-	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ada	ada	ada	ada	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	ada	ada	ada	ada	

NO	URAIAN KEGIATAN DALAM DPA	TOR		ANALISIS MENCAPAI OUTCOME	METODE PENENTUAN PRIORITAS
		KETERSEDIAAN	OUTCOME		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ada	ada	ada	ada
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ada	ada	ada	ada
	Penyediaan Makanan dan Minuman	ada	ada	ada	ada
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	ada	ada	ada	ada
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	ada	ada	ada	ada
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	ada	ada	ada	ada
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ada	ada	ada	ada
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	ada	ada	ada	ada
	Penatausahaan Keuangan	ada	ada	ada	ada
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD</b>				
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	ada	ada	ada	ada
6	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>				
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	ada	ada	ada	ada
	Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	ada	ada	ada	ada
	Peningkatan Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	ada	ada	ada	ada
	Pengolahan Akte Pencatatan Sipil	ada	ada	ada	ada
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK)	ada	ada	ada	ada

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat III. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada DPA organisasi telah tersedia analisis dan metode untuk menentukan prioritas kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*), akan tetapi untuk mencapai hasil (*outcome*) tersebut belum dilaksanakan analisis perbandingan alternatif antar kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*).

## (2) Variabel Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Variabel Monitoring dan Evaluasi**

NO	KEGIATAN MONEV	JADWAL	SASARAN/ FOKUS	STANDAR/ KRITERIA	ANALISIS UMPAN BALIK	TINDAKAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	3 (tiga) kegiatan (Belanja Pegawai kegiatan, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Jasa Internet Pelayanan Adminduk)	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
2	Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	24 Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Pelayanan KTP-EL dan KK	Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
3	Peningkatan Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	2 (dua) Kegiatan Belanja Pegawai Kegiatan dan Kegiatan Kerjasama Peningkatan Mutu Inovasi Pelayanan)	Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
4	Pengolahan Akte Pencatatan Sipil	2 Kegiatan (Belanja Pegawai Kegiatan & Pengarsipan Dokumen Pelayanan Catatan Sipil	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
5	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK)	6 (enam) Kegiatan (Penyediaan Blangko Kependudukan, Pengadaan Tinta Ribbon KTP-EL, Koordinasi dan Konsultasi Ke Kementrian, Sosialisasi Administrasi Kependudukan & Pemeliharaan Perangkat Pelayanan)	Kelompok Sasaran Kegiatan Disdukcapil, Stakeholders dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat	Tidak Ada	ada	ada
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 lembar Materai	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27 Jenis	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 (sembilan) Jenis Barang Cetakan	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada

NO	KEGIATAN MONEV	JADWAL	SASARAN/ FOKUS	STANDAR/ KRITERIA	ANALISIS UMPAN BALIK	TINDAKAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 (lima) Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
11	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	35 Jenis Surat Kabar	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	17 Kali	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	79 orang Peserta BPJS	Kelompok Sasaran Kegiatan PTT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor Disdukcasip	Tidak Ada	ada	ada
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8 unit roda 4 & 15 unit roda 2	Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas/operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
18	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 (enam) Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lapkin, LKPJ, LKPD, E-Monev, IKM dan Capaian Kinerja Kegiatan SKPD)	Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, CALK, LRA & Prognosis)	Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	ada	ada

NO	KEGIATAN MONEV	JADWAL	SASARAN/ FOKUS	STANDAR/ KRITERIA	ANALISIS UMPAN BALIK	TINDAKAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
21	Penatausahaan Keuangan	12 Laporan Keuangan Bulanan	Laporan Keuangan Berkala Disdukcipil	Tidak Ada	ada	ada
22	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD (Renja, RKT, RKA, DPA, RKAP & DPA Perubahan)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Disdukcipil	Tidak Ada	ada	ada

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini dibuktikan dengan sudah dilakukannya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dengan focus yang ditentukan, akan tetapi belum terdapat standar/kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.

### (3) Variabel Penjaminan Mutu Layanan

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Variabel Penjaminan Mutu Layanan**

NO	PRODUK YANG DIHASILKAN	BENTUK PENJAMINAN MUTU YANG DILAKUKAN	DOKUMEN STANDAR MUTU PRODUK	PELAKSANA PENGUJIAN MUTU INTERNAL	AHLI EKTERNAL
1	2	3	4	5	6
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang dilakukan.

### (4) Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel SOP pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan**

NO	PEKERJAAN	SOP	EVALUASI SOP	PERBAIKAN SOP	MASUKAN PELANGGAN
1	2	3	4	5	6
1	SOP Biodata Penduduk WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

NO	PEKERJAAN	SOP	EVALUASI SOP	PERBAIKAN SOP	MASUKAN PELANGGAN
1	2	3	4	5	6
2	SOP Biodata Penduduk WNA dari LN	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	SOP Biodata Penduduk WNA dari LN	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	SOP Perubahan Biodata Penduduk WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	SOP Perubahan Biodata Penduduk WNA dari LN	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	SOP Penerbitan KK Baru WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	SOP Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	SOP Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Menumpang WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	SOP Penerbitan dan Perubahan KK Bagi WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	SOP Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Menumpang WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	SOP Penerbitan KK Karena Rusak atau Hilang WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	SOP Penerbitan KTP-EL Baru Bagi WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	SOP Penerbitan KTP WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	SOP Penerbitan KTP Rusak atau Hilang Bagi WNI dan WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	SOP Penerbitan KTP Karena Pindah Datang Bagi WNI dan WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
16	SOP Penerbitan KTP Karena Perpanjangan Bagi WNI dan WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	SOP Penerbitan KTP Karena Perubahan Biodata Bagi WNI dan WNA	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Dalam Satu Desa Bagi WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Desa Bagi WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan Bagi WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan Bagi WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan Bagi WNI di Kecamatan Tujuan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
23	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kabupaten Bagi WNI di Desa Asal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
24	SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kabupaten Bagi WNI di Desa dan Kecamatan Tujuan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Antar Desa Dalam Satu Kecamatan di Desa Tujuan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten di Kecamatan Asal	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
28	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Antar Kecamatan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

NO	PEKERJAAN	SOP	EVALUASI SOP	PERBAIKAN SOP	MASUKAN PELANGGAN
1	2	3	4	5	6
	Dalam Satu Kabupaten di Kecamatan Tujuan				
29	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Antar Kabupaten atau Provinsi	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
30	SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Antar Kabupaten atau Provinsi di Daerah Tujuan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
31	SOP Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Dalam Satu Kabupaten di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
32	SOP Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas Dalam Satu Kabupaten di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	SOP Pindah Datang Antar Kabupaten Dalam Satu Provinsi atau antar Provinsi bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Terbatas	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
34	SOP Pendaftaran Pindah Datang WNI KELuar Negeri untuk Menetap Lebih Dari Satu Tahun	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
35	SOP Pendaftaran Pindah Datang WNI Dari Luar Negeri	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
36	SOP Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dari Luar Negeri	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
37	SOP Perubahan Status Orang Asing Dengan Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
38	SOP Orang Asing Yang Akan Pindah Keluar Negeri	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
39	SOP Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
40	SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Tempat Domisili Ibu WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
41	SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan di Luar Tempat Domisili Ibu WNI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
42	SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan Tempat Domisili dan Diluar Tempat Domisili Ibu Orang Asing	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
43	SOP Pencatatan Peristiwa Kelahiran Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
44	SOP Pencatatan Peristiwa Kelahiran Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
45	SOP Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
46	SOP Pencatatan Lahir Mati	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
47	SOP Perkawinan di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
48	SOP Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
49	SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
50	SOP Pencatatan Perceraian	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
51	SOP Pelaporan Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
52	SOP Pencatatan Pembatalan Perceraian	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

NO	PEKERJAAN	SOP	EVALUASI SOP	PERBAIKAN SOP	MASUKAN PELANGGAN
1	2	3	4	5	6
53	SOP Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
54	SOP Pencatatan Kematian Orang Asing di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
55	SOP Pelaporan Kematian Yang Tidak Diketahui Identitasnya	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
56	SOP Pencatatan Pelaporan Kematian WNI diluar Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
57	SOP Pencatatan Pengangkatan Anak Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
58	SOP Pencatata Pengangkatan Anak Orang Asing				
59	SOP Pencatatan Pengakuan Anak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
60	SOP Pencatatan Pengesahan Anak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
61	SOP Pencatatan Perubahan Nama	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
62	SOP Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Wilayah NKRI	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
63	SOP Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
64	SOP Pembetulan Akta Catatan Sipil	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
65	SOP Pembatalan akta Catatan Sipil	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
66	SOP Pendaftaran Pindah Datang Antar Kabupaten	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
67	SOP Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Musiman	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
68	SOP Darling	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya definisi proses yang dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP), akan tetapi belum dilakukan evaluasi secara berkala atas penerapan standar operasi prosedur (SOP) tersebut.

### (5) Variabel Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Variabel Pendidikan dan Pelatihan**

NO	JENIS JABATAN	RENCANA PENGEMBANGAN	REALISASI	EVALUASI RENCANA	EVALUASI DAMPAK
1	2	3	4	5	6
1	Jabatan Tinggi Pratama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Jabatan Administrator	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Jabatan Pengawas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Jabatan Fungsional	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Jabatan Pelaksana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: diolah oleh tim penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal



ini dikarenakan belum adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pengembangan pegawai (pendidikan dan pelatihan).

#### (6) Variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7. Variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah**

NO	KEBIJAKAN/MASALAH STRATEGIS	METODE PENYELESAIAN	NASKAH AKDEMIK/K AJIAN/ PERTIMBANGAN	KETERLIBATAN AHLI	KONSULTASI PUBLIK
1	2	3	4	5	6
1	PERDA No.7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	One Day One Service (KIA, KTP, KK, SKDWNI, SKPWNI) 14 hari kerja (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	PERBUP No. 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	One Day One Service (KIA, KTP, KK, SKDWNI, SKPWNI) 14 hari kerja (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan masalah belum dilakukan analisis kebijakan terhadap masalah tersebut dengan metode penyelesaian yang tidak terukur, dan belum ada tim internal yang mengkaji/menganalisis kebijakan tersebut.

#### (7) Variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur**

NO	SUMBER DAYA/KEGIATAN	ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA	STANDAR ANALISIS BIAYA	SOP PENGGUNAAN SUMBER DAYA	MONEV PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1	2	3	4	5	6
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan penggunaan sumber daya hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku, dan belum didasarkan atas analisis kebutuhan bahan/sumber daya yang sudah ditetapkan.

#### (8) Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 9. Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur**

NO	KEGIATAN/ PEKERJAAN	TINGKAT MANAJEMEN RESIKO		EVALUASI PENERAPAN	RESIKO YANG TERJADI
		INDIVIDU	ORGANISASI		
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Yang Bersifat Rutin di DPA	Pengelolaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Apabila terjadi kesalahan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya) diwajibkan kelengkapan dokumen lainnya sebagai alat pendukung kebenaran untuk di perbaiki ulang atas dokumen kependudukan tersebut	Revisi Pelaksanaan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Berkesinambungan	Tidak Ada

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan belum adanya manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah.

#### (9) Variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 10. Variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur**

NO	KINERJA	TARGET DALAM PEREJANJIAN KINERJA	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA	
				DOK PERJANJIAN	DOK PERENCANAAN
1	2	3	4	5	6
1	Survey Kepuasan Masyarakat	83	83	Tidak Ada	83
2	Nilai Evauasi SAKIP	B	B	Tidak Ada	B
3	Persentase Penduduk memiliki KTP-EL	88%	88%	Tidak Ada	88%
4	Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran	28%	28%	Tidak Ada	28%
5	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	76%	76%	Tidak Ada	76%
6	Persentase Anak yang memiliki KIA	20%	20%	Tidak Ada	20%
7	Persentase Penerbitan Akta Kematian	25%	25%	Tidak Ada	25%
8	Persentase Lembaga Pengguna Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10%	10%	Tidak Ada	10%

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat III. Hal ini dibuktikan dengan adanya target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan, namun pengukuran tingkat pencapaiannya belum jelas antara dokumen perjanjian dengan dokumen perencanaan.

#### (10) Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel pengembangan inovasi layanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11. Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah**

NO	KEGIATAN INOVASI	KETERANGAN
1	2	3
1	Darling (Kendaraan Keliling), SI PEPEN OC (Sistem Informasi Pelayanan Penduduk Online Chat), SI LANDAK (Sistem Informasi Layanan Digital Akta Kelahiran)	Inovasi Dibuat Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang dibuat berbasis digital oleh Tenaga Ahli

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengembangan produk melalui replikasi inovasi dari daerah lain, akan tetapi belum disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.

### (11) Variabel Budaya Organisasi

Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12. Variabel Budaya Organisasi**

NO	DOKUMEN/KEGIATAN BUDAYA ORGANSASI	KETERANGAN
1	2	3
1	Berbasis Pelayanan Prima Menuju Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mewujudkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan	Ada

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan belum adanya budaya organisasi perangkat daerah, maupun slogan-slogan yang menggambarkan nilai-nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan pada seluruh variabel kematangan organisasi, maka dapat disimpulkan kematangan organisasi yang berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

**Tabel 13. Rekapitulasi Tingkat kematangan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	Variabel	Tingkat Kematangan	
		Tingkat	Skor
1	2	3	4
1	Perencanaan	III	3
2	Monitoring dan Evaluasi	II	2
3	Penjaminan Mutu Layanan	I	1
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan	II	2
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	I	1
6	Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas	I	1
7	Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur	I	1
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	I	1
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur	III	3
10	Pengembangan Inovasi Layanan	II	2
11	Budaya Organisasi	I	1
<b>JUMLAH</b>			18

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan nilai pada masing-masing variabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sudah pada tingkat kematangan “SANGAT RENDAH” dengan skor 18.

#### 4. Kesimpulan

Perangkat daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik atau buruknya kinerja Pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah sebagai instrumen kebijakan pemingkatan kinerja perangkat daerah (kematangan/maturitas perangkat daerah). Perangkat daerah yang memperoleh skor 10-19 dikategorikan Sangat Rendah, skor 19,1-28 dikategorikan Rendah, skor 28,1-27 dikategorikan Sedang, skor 37,1-46 dikategorikan Tinggi, dan skor 46,1-55 dikategorikan Sangat Tinggi. Skor tersebut diperoleh dari hasil analisis 11 variabel penilaian kematangan perangkat daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola yang berkualitas dan berkinerja tinggi. Dengan demikian diharapkan perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi mampu memberikan pelayanan secara optimal. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah”. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel yang nilai kematangannya sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah berkenan dan memberikan dukungan sehingga studi untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan.

#### 6. Daftar Pustaka

- Ahmari, A., & Amar, S. (2014). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 2(3). <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/view/5363>
- Arikunto, S. (2007). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayudia, P., & Abdullah, S. (2023). Analisis Keselarasan Dokumen Perencanaan,

- Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 23(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/14353>
- Azmi, C. (2022). *Pemetaan Kondisi Kematangan (Maturity) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Studi Kasus UKPBJ Daerah Provinsi Kepulauan Riau*. <https://repository.its.ac.id/94370/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed methods Approaches*. In *SAGE* (5th ed.). SAGE Publications.
- Ekowati, M., & Akbar, F. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Media Birokasi*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.2736>
- Gottschalk, P. (2009). Maturity levels for interoperability in digital government. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.03.003>
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (2022).
- Khairi, H. (2021). *Organisasi Sektor Publik*. Penerbit NEM.
- Khairi, H. (2022). A Model for Simplifying the Organizational Structure of the Bureaucracy in Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349>
- Khairi, H., Yahya, A. S., & Alma'arif. (2018). *Tingkat Maturitas Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat*.
- Kumar, R. (2008). *Research Methodology*. SAGE Publications Ltd.
- Kusmana, D., & Prasetyawan, F. (2021). Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam Menerapkan Sistem Merit Berbasis Talent Scouting di Kabupaten Tegal. *Jurnal Media Birokasi*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2475>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, (2018).
- Nawawi, H., & Martini, M. (2005). *Penelitian terapan*. Gajah Mada University Press.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Nuradhawati, R. (2019). *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. *ACADEMIA PRAJA: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*,

- 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurrahman, A., & Rahmadanita, A. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Media Birokasi*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2854>
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (2016).
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut). *Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2140>
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30>
- Suwandi, I. M., & Yahya, A. S. (2017a). *Refleksi Otonomi Daerah di Indonesia*. Alqa print.
- Suwandi, I. M., & Yahya, A. S. (2017b). *Reformasi Otonomi Daerah*. Alqa print.
- Suwandi, I. M., & Yahya, A. S. (2019). *Penguatan Tata Kelola Pembangunan Kesehatan*. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research*. Sage.
- Widigdo, A. L. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v4i1.736>
- Yahya, A. S. (2023). *Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*.
- Yahya, A. S., & Amzan, A. Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Melalui Program PAPA JOSS di Kabupaten Padang Pariaman. *KYBERNAN: Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.2420>

Yahya, A. S., & Setiyono. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. *Jurnal Media Birokasi*, 4(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).